

NAHDLATUL ULAMA DAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA

Nur Anis Rochmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

Email: nuranis189@gmail.com

Corresponding Author: Nur Anis Rochmawati

Abstract: Religious moderation as a religious deradicalization program formulated by the Ministry of Religion, in the public domain, has raised concerns from several parties that it will become a practice of power and domination. Starting from this, this article attempts to examine the central role of Nahdlatul Ulama in the construction of official discourse on the religious moderation program. After reading two documents, the book Religious Moderation and the Roadmap for Strengthening Religious Moderation, this article concludes that the strategic position of Nahdlatul Ulama (NU) cadres in the Ministry of Religion is a quite logical reason why the principles that NU always promotes become key terms in the construction of official discourse on religious moderation programs.

Keywords: Religious Moderation, Nahdlatul Ulama, Official Discourse

Pendahuluan

Program moderasi beragama menjadi pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme yang terus membayangi perjalanan pemerintahan Joko Widodo.¹ Dalam diskusi yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), penguatan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

¹Joko Widodo, 'Amanat Presiden Jokowi pada Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)' (Sekretariat Presiden, 2020).

(RPJMN) 2020-2024 dianggap cukup penting mengingat masih lemahnya pemahaman dan pengamalan umat beragama terhadap nilai agama yang toleran, moderat, inklusif, dan substantif.² Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, pemerintah menetapkan moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mewujudkan ‘Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan’ dengan program prioritas ‘Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial’. Demi keberhasilan program ini pemerintah menggelontorkan dana Rp. 21.945,4 miliar,³ yang pada September 2022 meningkat secara signifikan menjadi Rp. 3,2 triliun.⁴

Serangkaian langkah kerja penguatan moderasi beragama ditetapkan melalui dua dokumen resmi: *Moderasi Beragama* (selanjutnya ditulis Buku Induk) dan *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* (selanjutnya ditulis Roadmap) yang masing-masing diterbitkan pada 2019 dan 2020 oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jika Buku Induk ditempatkan sebagai naskah akademik menuju penguatan dan pengarusutamaan moderasi beragama, Roadmap memberi uraian secara sistematis terkait langkah-langkah yang direncanakan dalam pengarusutamaan diskursus moderasi beragama, problem-problem utama yang dilihat, kelompok strategis yang jadi sasaran, serta uraian kegiatan prioritas moderasi beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN 2020-2024.⁵

Wasisto Raharjo Jati menyebut bahwa dekade 2020-an sebagai “*traditionalist turn*”, di mana pada dekade ini kelompok yang disebut sebagai tradisionalis tidak hanya cukup kentara dalam beberapa posisi pemerintahan; mereka bahkan seakan menjadi mazhab negara.⁶ Sebagai tumpuan reaksi yang disponsori pemerintah dalam melawan

²Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024* (Jakarta, 2020).

⁴Republika, ‘DPR: Anggaran Moderasi Beragama Naik Jadi R0 3,2 T’, *Republika*, 2021 <<https://www.republika.id/posts/20756/dpr-anggaran-moderasi-beragama-naik-jadi-rp-32-t>>.

⁵Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020).

⁶Wasisto Raharjo Jati, ‘Nahdlatul Ulama’s Traditionalist Campaign Shaping Mainstream Indonesian Islamic Discourse’, *Fulcrum: Analysis on Southeast Asia*, 2022 <<https://fulcrum.sg/nahdlatul-ulamas-traditionalist-campaign-shaping-mainstream-indonesian-islamic-discourse/>>.

radikalisme--pasca peristiwa protes melawan Ahok yang dimobilisasi kelompok-kelompok islamis--NU tampak semakin berdaya. Presiden memberikan perhatian dan mencurahkan lebih banyak sumber daya keuangan, politik, dan institusional bagi NU untuk menyusun serta mempromosikan Islam yang mampu mengepung kekuatan radikalisme Islam.⁷ Puncaknya adalah moderasi beragama yang disebut sebagai program prioritas antara pemerintah dengan NU.⁸ Wasisto Raharjo Jati melihat program deradikalisasi melalui moderasi beragama pada dasarnya memang menggunakan program khas NU; Islam Nusantara yang memiliki ciri khas apresiasi terhadap budaya lokal serta toleransi dan keragaman.⁹ Syafiq Hasyim turut menyebut bahwa terminologi simbolik yang diperkenalkan NU pada tahap perkembangannya dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan moderasi beragama.¹⁰ Kaum tradisionalis ini tampaknya telah menjadi pelopor dalam mengadvokasi bentuk Islam moderat di Indonesia. Sejak tahap pembentukan wacana, NU telah mendapat ruang yang lebih besar. Dalam diskursus ini penulis hendak melihat bagaimana NU—melalui berbagai kepribadian dan jaringan yang terbentuk—mampu mengambil peran penting dalam penyusunan dokumen resmi program moderasi beragama.

Moderasi Beragama sebagai Program Nasional

Joko Widodo menegaskan bahwa di tengah gelombang ekstremisme, moderasi beragama adalah pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila.¹¹ Dalam diskusi yang melibatkan pihak-pihak Kemenag dan Bappenas, penguatan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dianggap cukup penting mengingat salah satu isu strategis yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015-2019 adalah *“masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan*

⁷Nava Nuraniyah, 'Divided Muslims: Militant Pluralism, Polarisation and Democratic Backsliding', dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power dan Eve Warburton (Terrace: ISEAS, 2020), 97.

⁸Kementerian Agama RI, 'Menag Yaqut: Kontribusi Positif NU Untuk Bangsa Perlu Terus Dijaga', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 <<https://kemenag.go.id/nasional/menag-yaqut-kontribusi-positif-nu-untuk-bangsa-perlu-terus-dijaga-xebgu6>>.

⁹Jati, 'Nahdlatul Ulama's Traditionalist.

¹⁰Syafiq Hasyim, 'Commanding Right and Forbidding Wrong: The Rising Influence of Muslim Mainstream Groups', *ISEAS*, 78 (2021).

¹¹Widodo, 'Amanat Presiden Jokowi.

toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama.”¹² Dalam rancangan Bappenas, tema besar RPJMN 2020-2024 adalah “*Indonesia Berprestasi Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*” yang akan direalisasikan dalam lima tema besar aspek pengarusutamaan: kesetaraan gender, tata kelola (*governance*), pembangunan berkelanjutan, modal sosial budaya, dan pembangunan transformasi digital. Pada mulanya Kemenag mengusulkan agar moderasi beragama ditambahkan menjadi yang keenam, dengan alasan bahwa dalam konteks pembangunan Indonesia, agama sama sekali tidak dapat dipisahkan dari aspek apa pun dalam kehidupan masyarakat. Namun karena proses memasukkan satu gagasan agar menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, sementara waktu penetapan RPJMN 2020-2024 sudah mendesak, moderasi beragama ditempatkan dalam salah satu program penguatan terlebih dahulu.¹³ Untuk mengetahui posisi pasti moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024, perlu mengetahui bahwa lima prioritas pengarusutamaan tersebut diturunkan lagi ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), dan sebagaimana Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan prioritas keempat; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas ‘Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial’.¹⁴ Untuk meluncurkan program ini pemerintah menggelontorkan dana Rp. 21.945,4 miliar.¹⁵ Namun dari tahun ke tahun anggaran untuk moderasi beragama terus meningkat, dan secara signifikan pada September 2022 pemerintah menaikkan anggaran delapan kali lipat, menjadi Rp. 3,2 triliun.¹⁶ Pengguliran dana yang cukup besar menandakan bahwa program moderasi beragama benar-benar ditempatkan sebagai program penting dalam pemerintahan Joko Widodo.

¹²Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 131-132.

¹³Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 130-131.

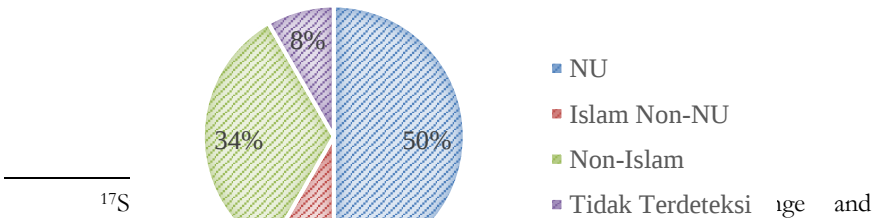
¹⁴Presiden Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (Jakarta, 2020).

¹⁵Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18*.

¹⁶Republika, ‘DPR: Anggaran Moderasi Beragama.

Posisi Strategis Nahdlatul Ulama dalam Kementerian Agama

Pemerintah Joko Widodo terus menempatkan kader-kader NU sebagai aktor penting dalam Kementerian Agama yang diharap mampu menjadi pembicara utama dalam memajukan kehidupan keberagamaan yang harmonis.¹⁷ Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU (1992-1995) dan Wakil Sekretaris PP-LKKNU (1985-1988) terus ditempatkan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Kerja periode pertama (9 Juni 2014-20 Oktober 2019).¹⁸ Kontribusi paling penting Lukman Hakim selama menjabat adalah dengan diinisiasinya moderasi beragama yang selanjutnya ditetapkan sebagai program nasional. Pada Kabinet Kerja periode kedua, Yaqut Cholil Qoumas (Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor pada 2015-2020) ditunjuk sebagai Menteri Agama (23 Desember 2020-sekarang) menggantikan Fachrul Razi yang hanya menjabat selama 14 bulan. Alasan penunjukkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi--yang disinyalir sebagai sosok anti-radikalisme, dan itu artinya telah sejalan dengan program prioritas pemerintah--¹⁹tidak lepas dari jabatan strategisnya di Ansor, sebagaimana disampaikan Joko Widodo di Istana Merdeka pada 22 Desember 2020, “*beliau adalah tokoh muslim Ketua GP Ansor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama.*”²⁰ Tidak hanya Menteri Agama, pejabat tinggi Kemenag lainnya pun tidak sedikit yang dipegang oleh kader-kader NU.²¹



¹⁷S
Opportunity
¹⁸A

Kebijakan I
Normatif,
(Gagasan-
Kinerja: Moderasi Beragama dan Transformasi Kelembagaan Penguatan) (Jakarta: Rehobot
Literature (Bersama dengan Ditjen Bimas Kristen RI), 2019).

¹⁹A'an Suryana, 'The Shi'as and Freedom of Religion under Joko Widodo's
Presidency', *ISEAS*, 62 (2022).

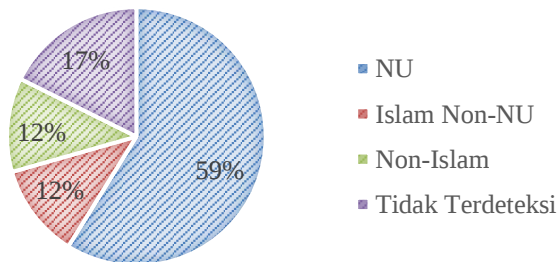
²⁰Fitria Chusna Farisa, 'Breaking News: Yaqut Cholil Qoumas Gantikan
Fachrul Razi sebagai Menteri Agama', *kompas.com*, 2020.

²¹Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta
Jalan (Roadmap)*.

Gambar 1. Persentase Afiliasi Keagamaan Pejabat Tinggi Kementerian Agama Periode 2019-2024

Dokumen Resmi Moderasi Beragama

Serangkaian langkah kerja penguatan moderasi beragama ditetapkan Kemenag melalui dua buku Moderasi beragama bersandar pada dua dokumen resmi terbitan Kemenag, yaitu buku *Moderasi Beragama* (Buku Induk) dan *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama*. Buku Induk lahir atas kerja sama tiga instansi: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, serta Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun kontributor terkait memiliki afiliasi dengan persentase sebagai berikut:²²



Gambar 2. Persentase Afiliasi Keagamaan Kontributor Buku Induk Moderasi Beragama

Buku Induk dapat disebut sebagai naskah akademik menuju penguatan dan pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Bangunan argumentasi dalam Buku Induk utamanya diarahkan untuk meneguhkan bahwa kerukunan bukanlah hal yang diraih begitu saja. Melainkan harus ditempuh dengan serangkaian pola; sosialisasi,

²²Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*.

gerakan, dan program sistematis yang terencana dengan baik. Sebagai suplemen, selanjutnya Kemenag turut menerbitkan buku saku ‘*Tanya Jawab Moderasi Beragama*’ sebagai bagian tidak terpisahkan dari Buku Induk. Buku tersebut dapat dikatakan sebagai ringkasan dari Buku Induk.²³

Pasca diterima dan dijadikannya moderasi beragama sebagai konsep, arah, dan strategi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia--agar tujuan dari gerakan penguatan moderasi beragama dapat dicapai dengan baik, dan keberhasilannya dapat diukur dengan parameter yang jelas--Kemenag merasa perlu untuk segera merancang bagaimana tahapan dan langkah strategis penguatan moderasi beragama akan dilakukan. Pada penghujung 2020 Kemenag meluncurkan *Roadmap*. Dokumen tersebut disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama, dengan ketua Oman Fathurahman dan beberapa Tim Ahli seperti Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid, dan Hadi Rahman. Rumusan dan kerangka utama *Roadmap* mengikuti norma yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun turunan kerangka implementasinya telah mengalami pengayaan dan penyempurnaan. *Roadmap* memberi uraian secara sistematis terkait langkah-langkah yang direncanakan dalam pengarusutamaan diskursus moderasi beragama, problem-problem utama yang dilihat, kelompok strategis yang jadi sasaran, serta uraian kegiatan prioritas moderasi beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN 2020-2024.²⁴

Konstruksi Wacana Resmi

1. Pengertian Moderasi Beragama

Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin menyinggung bagaimana gagasan moderasi beragama yang dikembangkan Kemenag diwarnai konsep yang berakar cukup kuat dalam tradisi Islam, wasatiah.²⁵ Wasatiah sebagai fondasi program moderasi beragama memang tergambar jelas pada dokumen resminya. Dalam Buku Induk

²³Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²⁴Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap)*.

²⁵Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, ‘Epilog: Cukupkah menjadi Moderat?’, dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Gramedia, 2022), 167.

dituliskan bahwa, “*moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah*”.²⁶ Bentuk wasathiah yang dimaksudkan moderasi beragama adalah sebagaimana dikembangkan Mohammad Hashim Kamali. Dengan meminjam pendapat Kamali, dijelaskan dalam Buku Induk bahwa prinsip dasar moderasi beragama adalah keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) yang selanjutnya dimaknai sebagai sikap yang harus ditampakkan umat beragama untuk tidak ekstrem terhadap pandangannya; melainkan harus senantiasa mencari titik temu. Makna ‘berimbang’ sendiri lebih lanjut dikembangkan—dengan meminjam pendapat Ismail Raji al-Faruqi—sebagai “*sikap menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya mencari titik temu menggabungkannya*.”²⁷ Berpijak dari argumentasi tersebut, akhirnya, agenda utama yang ditetapkan moderasi beragama adalah menarik ekstrem kiri (liberal) dan ekstrem kanan (konservatif), menuju posisi tengah (moderat).²⁸ Untuk menggambarkan ekstrem kiri, Buku Induk menengahkan contoh tafsir liberal sebagian sarjana muslim yang menghalalkan hubungan seks di luar nikah. Adapun ekstrem kanan, Buku Induk memasukkan mulai dari kelompok yang “fanatik”, “konservatif”, “ultra-konservatif”, “ekstrem”, “garis keras”, sampai tindakan “terorisme”. Hadirnya moderasi beragama yang dibayangkan menempati posisi tengah dimaksudkan untuk menengahi dua kutub ekstrem ini dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif serta melakukan kontekstualisasi teks agama.

Namun mengingat betapa luas dan kabur batasan-batasan yang dibuat dalam menempatkan posisi-posisi “ekstrem”, konsep moderasi beragama—dalam Buku Induk—yang berfokus untuk terus-terusan membangun “jalan tengah” pada tahap selanjutnya mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut segera tampak ketika dokumen *Roadmap* memberikan rumusan baru yang sama sekali lain. Meski masih tetap merujuk pada aspek filologi kata “moderat”, baik dalam bahasa Latin (*moderatio*), Arab (*wasat* atau *wasat* *i>yah*), maupun Indonesia (pengurangan kekerasan atau pengurangan kekerasan), moderasi beragama dirumuskan ulang secara lebih konkret sebagai: *Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslabatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan*

²⁶Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 16.

²⁷Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 17-23.

²⁸Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 7.

*menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.*²⁹ Definisi semacam ini mengandung makna strategis untuk menempatkan paham keagamaan sebagai daya pengungkit atas supremasi martabat kemanusiaan dan kepentingan bersama berdasar konstitusi sebagai manifestasi esensi ajaran agama. Dalam hal ini agama ditempatkan pada fungsi yang semestinya; memanusiakan manusia.³⁰ Dengan rumusan baru ini, moderasi beragama ditempatkan dalam konteks yang lebih riil dan sesuai dengan tantangan kekinian. Moderasi beragama dapat diapresiasi sebagai tekad pemerintah untuk memperbaiki layanan pada umat beragama; orientasinya memang terlihat lebih diarahkan pada perbaikan layanan, perbaikan dalam birokrasi, juga dalam pendidikan keagamaan.

2. Kualifikasi Moderat menurut Program Moderasi Beragama

Moderasi beragama menetapkan empat pilar yang dianggap mampu menavigasi antara dua ancaman utama (ekstremisme dan liberalisme) dalam konteks berbangsa dan bernegara, diantaranya; komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagamaan, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan pada segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi di tengah masyarakat. *Pertama*, komitmen kebangsaan. Dalam pandangan moderasi beragama, jika seseorang dengan atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, UUD 1945, dan NKRI yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka dinilai sebagai ekstrem dan melanggar.³¹ Mengingat Indonesia bukanlah negara teokratis ataupun sekuler,³² beragama secara moderat dimaknai sebagai tindakan untuk tidak memaksakan satu agama sebagai ideologi negara maupun mencabut nilai-nilai spiritual agama dari keseluruhan ideologi negara.³³ Moderasi beragama menolak pendirian atau formalisasi satu agama, bahkan memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi seluruh kepentingan, dan melindungi segenap

²⁹Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap)*, 14-16.

³⁰Suwendi, 'Moderasi Beragama dan Civil Society', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2021.

³¹Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, 12.

³²Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 65.

³³Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 51.

keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa.³⁴ *Kedua*, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan. Strategi kebinekaan yang dibutuhkan bagi kehidupan bersama masyarakat majemuk dapat dikembangkan lewat apa yang disebut moderasi beragama sebagai upaya mengembangkan ‘budaya toleransi sejati’. Toleransi sejati yang dimaksudkan adalah bentuk toleransi yang bukan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, melainkan juga turut aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerja sama dalam kehidupan sosial budaya.³⁵ Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan untuk memberikan ruang, sekaligus tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan serta mengekspresikan keyakinannya, sekalipun itu bertolak belakang dengan apa yang ia yakini.³⁶

Ketiga, penolakan pada segala bentuk kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama mengajarkan agar umat beragama mampu memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi.³⁷ Sebagai bagian dari strategi nir-kekerasan, indikator moderat diukur melalui seberapa tinggi penolakan terhadap tindak kekerasan—baik secara fisik maupun verbal—dalam usahanya untuk mengusung perubahan.³⁸ *Keempat*, akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan argumentasi, “*pengembangan budaya sudah seharusnya menghargai nilai-nilai agama, dan pengembangan agama juga tidak menghancurkan keragaman adat istiadat dan budaya*,”³⁹ moderasi beragama hadir untuk kembali melakukan penguatan atas hubungan keduanya.⁴⁰ Akomodatif terhadap budaya lokal ditempatkan sebagai salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama,⁴¹ dengan alat ukur sejauh mana penerimaan individu terhadap tradisi dan budaya dalam perilaku keagamaannya.⁴² Nantinya orang-orang yang dikategorikan sebagai

³⁴Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 66.

³⁵Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 81.

³⁶Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 62.

³⁷Muhammad Fauzinudin Faiz, ‘Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023.

³⁸Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap)*, 21-23.

³⁹Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 114.

⁴⁰Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 28 dan 135.

⁴¹Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 43.

⁴²Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap)*, 23.

‘moderat’ adalah mereka yang menunjukkan tradisi keberagamaan yang tidak kaku. Ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif.⁴³

Prinsip Ideasional Nahdlatul Ulama dalam Konstruksi Wacana Resmi Moderasi Beragama

1. Wasathiah sebagai Titik Pijakan Moderasi Beragama

Egi Tanadi menyebut bahwa dalam dua dekade terakhir gagasan dan gerakan yang mengusung konsep wasathiah dari tradisi Islam memang terus digalakkan sebagai wacana alternatif yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Indonesia yang memiliki realitas sosial multi-agama, multi-etnis dan multikultural.⁴⁴ Wasathiah yang ditempatkan sebagai titik pijak moderasi beragama adalah atribut yang telah lama melekat dan kembali ditumbuhkan NU melalui ortodoksi Islam Nusantara,⁴⁵ yang mana terminologi ini secara masif digaungkan pasca pelaksanaan Muktamar NU ke-33 (1-5 Agustus 2015).⁴⁶ Moch. Syarif Hidayatullah dan Abdullah--dengan memasukkan kata kunci “*wasathiyah*”, “*wasathiyah*”, “moderat”, “moderasi”, dan “*wasathiyah*” pada situs NU online--menemukan 39 judul konten yang bersesuaian. Data-data tersebut menunjukkan dukungan yang kuat dari NU terhadap gagasan dan implementasi wasathiah dalam konteks Islam Indonesia. NU dengan segenap lembaga otonomnya, pengurus wilayah, dan pengurus cabangnya juga para tokoh yang berafiliasi kepada NU secara kultural, mendukung sepenuhnya penerapan Islam wasathiah.⁴⁷

⁴³Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 46.

⁴⁴Egi Tanadi, ‘Indonesia. Negeri Seribu Moderasi: Kritik Historiografis-Netnografis Terhadap Pelaksanaan SK Menag Nomor 529 Tahun 2021 tentang Penguatan Program Moderasi Beragama’, dalam Alquran, Keragaman dan Keindonesiaan -1: Bunga Rampai Makalah Alquran LKTIQ MTQ Kalbar 2022, ed. Ibrahim, Zaenuddin, Yusriadi (Kalimantan Barat: LKTIQ MTQ Kalbar, 2023), 78.

⁴⁵Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekusaan* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 8.

⁴⁶Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 10.

⁴⁷Moch. Syarif Hidayatullah dan Abdullah, *Kontestasi Ideologi Islam Wasathiyah dan Islam Kafah di Media Online* (Jakarta, 2020), 53-59.

2. Klasifikasi Moderat

Pertama, terkait komitmen kebangsaan, NU kerap digambarkan sebagai representasi Islam Indonesia moderat⁴⁸ yang secara konsisten memberi dukungan penuh pada Pancasila dan NKRI.⁴⁹ Menurut hasil survei yang dilakukan PPIM Jakarta, penerimaan ulama NU atas konsep negara memang terbilang tinggi, mencapai 83%.⁵⁰ Sikap penerimaan NU atas negara sebenarnya telah ditunjukkan sejak lama, bahkan dalam Muktamar 1984 di Situbondo dipertegas dengan pernyataan, 'Pancasila sebagai asas organisasi Nahdlatul Ulama'.⁵¹ *Kedua*, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan. Sebagai respon atas penyebaran Islam radikal, Konferensi ulama se-ASEAN dengan tema "*Strategi Dakwah Menuju Ummatan Wasathon*" untuk pertama kalinya digelar. Dari sini terbentuk *Center for Moderate Moslem* (CMM) yang dikomandoi NU dan Muhammadiyah.⁵² Keduanya diharuskan mengambil peran lebih besar dalam perebutan ruang publik, sekaligus menjadi subjek utama untuk merawat Islam Indonesia yang berkarakter Islam wasathiah. Di samping mengembalikan jati diri Islam, NU dan Muhammadiyah ditempatkan sebagai aktor utama dalam aktualisasi Islam yang ramah, toleran dan damai.⁵³ Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa "*NU telah menjadikan agama sebagai sumber toleransi, perdamaian, serta kemajuan*" dan mengimbau untuk terus mempromosikannya.⁵⁴

Ketiga, penolakan pada segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dalam kunjungannya ke Indonesia, David Cameron (Perdana Menteri Inggris) mempertanyakan kunci keberhasilan Indonesia untuk

⁴⁸Abdil Mughis Mudhoffir, 'Islamic Populism and Indonesia's Illiberal Democracy', dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power dan Eve Warburton (Terrace: ISEAS, 2020), 130-131.

⁴⁹Ahmad Najib Burhani, 'Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism', *ISEAS*, 21 (2018), 22.

⁵⁰Suhadi dan Miftahun Ni'mah Suseno, 'The Survey of Ulama and The Nation-State', dalam *Ulama and The Nation-State: Comprehending the Future of Political Islam in Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2019), 28.

⁵¹M. Kamil Akhyari, 'Benarkah NU Moderat?', dalam *Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), 71-72.

⁵²Abu Amar, 'Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An', *Al-Insiyroh*, 2.2 (2018); 28.

⁵³Azyumardi Azra, 'Kembali Ke Jati Diri (2)', *Republika*, 24 November 2016.

⁵⁴Jeremy Menchik dan Katrina Trost, 'A "Tolerant" Indonesia? Indonesian Muslims in Comparative Perspective', dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, ed. Robert W. Hefner (London dan New York: Routledge, 2018), 390.

meminimalisir radikalisme. Tidak sedikit yang mengatakan, salah satu kunci keberhasilan itu adalah eksistensi dan hegemoni ormas-ormas Islam yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya arus utama NU dan Muhammadiyah.⁵⁵ Bahwa ‘Islam tidak menganjurkan kekerasan’ adalah salah satu prinsip yang senantiasa dipegang NU.⁵⁶ Dalam pemaknaan jihad misalnya, saat kelompok salafi memaknainya sebagai perang, NU memaknai jihad dengan kesungguhan dan kerja keras dalam setiap kebaikan. Termasuk bersungguh-sungguh memerangi kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan bentuk kezaliman lain.⁵⁷ *Keempat*, akomodatif terhadap budaya lokal. Penerimaan unsur budaya dalam praktik keagamaan Islam paling sering digambarkan oleh kelompok NU. Karena memisahkan agama dari budaya dalam pengalaman historis masyarakat Indonesia adalah sebuah ketidakmungkinan, NU--dengan konsep Islam Nusantara--menekankan sikap toleran pada dua domain besar, di samping terhadap kelompok minoritas juga toleransi terhadap budaya lokal dalam hal ritual keagamaan.⁵⁸ NU memang sangat apresiatif dalam menghadapi tradisi-tradisi keagamaan yang dikategorikan sebagai ciri dari Islam tradisional Indonesia seperti upacara siklus kehidupan, ziarah kubur, tawasul, membaca kitab berzanji.⁵⁹

Kesimpulan

Moderasi beragama yang diproyeksikan negara sebagai program deradikalisasi keagamaan menempatkan Buku Induk dan *Roadmap* sebagai titik pijak bagi terlaksananya program. Keduanya memuat seputar gagasan “mengapa” dan “bagaimana” moderasi beragama harus dijalankan. Di samping wasatiah yang dijadikan sebagai titik pijak, moderasi beragama menetapkan empat pilar yang ditempatkan sebagai

⁵⁵Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah*, ed. Idris Thaha (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020), 185-186.

⁵⁶Angel M. Rabasa, ‘Southeast Asia: Moderate Tradition and Radical Challenge’, dalam *The Muslim World After 9/11*, ed. Angel M. Rabasa (California: Rand Corporation, 2004), 410.

⁵⁷Zainun Wafiqatun Niam, ‘Konsep Islam Wasathiyah sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil’alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia’, *Palita*, 4.2 (2019), 98.

⁵⁸Hisanori Kato, ‘The Islam Nusantara Movement in Indonesia’, dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements*, ed. Muhammad Afzal Upal dan Carole M. Cusack (Leiden; Boston: Brill, 2021), 123.

⁵⁹Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 37-39.

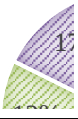


indikator keberhasilan. Namun moderasi beragama yang digadag-gadang sebagai upaya memposisikan umat beragama dalam posisi setara, faktanya tetap menghadirkan kelompok-kelompok yang lebih diuntungkan. Program ini menyediakan ruang yang lebih besar bagi satu segmen golongan ‘moderat’ dengan menempatkannya sebagai aktor dalam penyusunan dokumen resmi moderasi beragama. Akibatnya, beberapa kata kunci dalam dokumen resmi moderasi beragama yang menjadi titik berangkat dalam pelaksanaan program mengarah pada prinsip-prinsip yang senantiasa digaungkan oleh salah satu kelompok keagamaan dan bertolak belakang dengan beberapa kelompok keagamaan yang lain. Jika mencermati dari setiap indikator yang ditetapkan, tampak bahwa moderasi beragama sebenarnya berusaha melakukan seleksi antara siapa yang akan diambil bahkan dipertahankan dan siapa yang harus disingkirkan dari keikutsertaannya dalam kebijakan-kebijakan negara.

Referensi

- Akhyari, M. Kamil, ‘Benarkah NU Moderat?’, dalam *Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015)
- Amar, Abu, ‘Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An’, *Al-Insyiroh*, 2.2 (2018)
- Azra, Azyumardi, ‘Kembali ke Jati Diri (2)’, *Republika*.
 ———, *Relevansi Islam Wasathiyah*, ed. Idris Thaha (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020)
- , *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung: Rosdakarya, 2000)
- Bagir, Zainal Abidin dan Jimmy M.I. Sormin, Zainal, ‘Epilog: Cukupkah Menjadi Moderat?’, dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Gramedia, 2022)
- Burhani, Ahmad Najib, ‘Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism’, *ISEAS*, 21 (2018)
- Suhadi dan Miftahun Ni’mah Suseno, ‘The Survey of Ulama and The Nation-State’, in *Ulama and The Nation-State: Comprehending the Future of Political Islam in Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2019)
- Faiz, Muhammad Fauzinudin, ‘Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023
- Farisa, Fitria Chusna, ‘Breaking News: Yaqut Cholil Qoumas Gantikan Fachrul Razi Sebagai Menteri Agama’, *Kompas.com*, 2020

- Hasan, Mohammad, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017)
- Hasan, Nor, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018)
- Hasyim, Syafiq, 'Commanding Right and Forbidding Wrong: The Rising Influence of Muslim Mainstream Groups', *ISEAS*, 78 (2021)
- , 'Jokowi's Moderasi Beragama: Challenge and Opportunity', *ISEAS*, 149 (2021)
- Hidayatullah dan Abdullah, Moch. Syarif, *Kontestasi Ideologi Islam Wasathiyah dan Islam Kafah di Media Online* (Jakarta, 2020)
- Jati, Wasisto Raharjo, 'Nahdlatul Ulama's Traditionalist Campaign Shaping Mainstream Indonesian Islamic Discourse', *Fulcrum: Analysis on Southeast Asia*, 2022
- Kato, Hisanori, 'The Islam Nusantara Movement in Indonesia', dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements*, ed. Muhammad Afzal Upal dan Carole M. Cusack (Leiden; Boston: Brill, 2021)
- Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Kementerian Agama RI, 'Menag Yaqut: Kontribusi Positif NU untuk Bangsa Perlu Terus Dijaga', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022
- , *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Menchik dan Katrina Trost, Jeremy, 'A "Tolerant" Indonesia? Indonesian Muslims in Comparative Perspective', dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, ed. Robert W. Hefner (London dan New York: Routledge, 2018)
- Mudhoffir, Abdil Mughis, 'Islamic Populism and Indonesia's Illiberal Democracy', dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power dan Eve Warburton (Terrace: ISEAS, 2020)
- Niam, Zainun Wafiqatun, 'Konsep Islam Wasathiyah sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia', *Palita*, 4.2 (2019)
- Nuraniyah, Nava, 'Divided Muslims: Militant Pluralism, Polarisation and Democratic Backsliding', dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power dan Eve Warburton



- (Terrace: ISEAS, 2020)
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024* (Jakarta, 2020)
- Rabasa, Angel M., 'Southeast Asia: Moderate Tradition and Radical Challenge', dalam *The Muslim World After 9/11*, ed. Angel M. Rabasa (California: Rand Corporation, 2004)
- Republika, 'DPR: Anggaran Moderasi Beragama Naik Jadi R0 3,2 T', *Republika*, 2021
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020)
- Suryana, A'an, 'The Shi'as and Freedom of Religion under Joko Widodo's Presidency', *ISEAS*, 62 (2022)
- Suwendi, 'Moderasi Beragama Dan Civil Society', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2021
- Syahid, Achmad, 'Lukman Hakim Saifuddin: Pembawaan Normatif, Kebijakan Inklusif dan Legasi Prestasi', dalam *Lukman Hakim Saifuddin (Gagasan-Kinerja: Moderasi Beragama dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan)* (Jakarta: Rehobot Literature (Bersama dengan Ditjen Bimas Kristen RI), 2019)
- Tanadi, Egi, 'Indonesia. Negeri Seribu Moderasi: Kritik Historiografis-Netnografis Terhadap Pelaksanaan SK Menag Nomor 529 Tahun 2021 Tentang Penguatan Program Moderasi Beragama', dalam *Alquran, Keragaman dan Keindonesiaan -1: Bunga Rampai Makalah Alquran LKTIQ MTQ Kalbar 2022*, ed. Yusriadi Ibrahim, Zaenuddin (Kalimantan Barat: LKTIQ MTQ Kalbar, 2023)
- Widodo, Joko, 'Amanat Presiden Jokowi pada Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)' (Sekretariat Presiden, 2020)